

Last Updated : 14/11/2025 16.45.00

Overview I-Account APBN

Pendapatan

Rp11,1 T (770,3%)
▼ -32,4% (yoy)

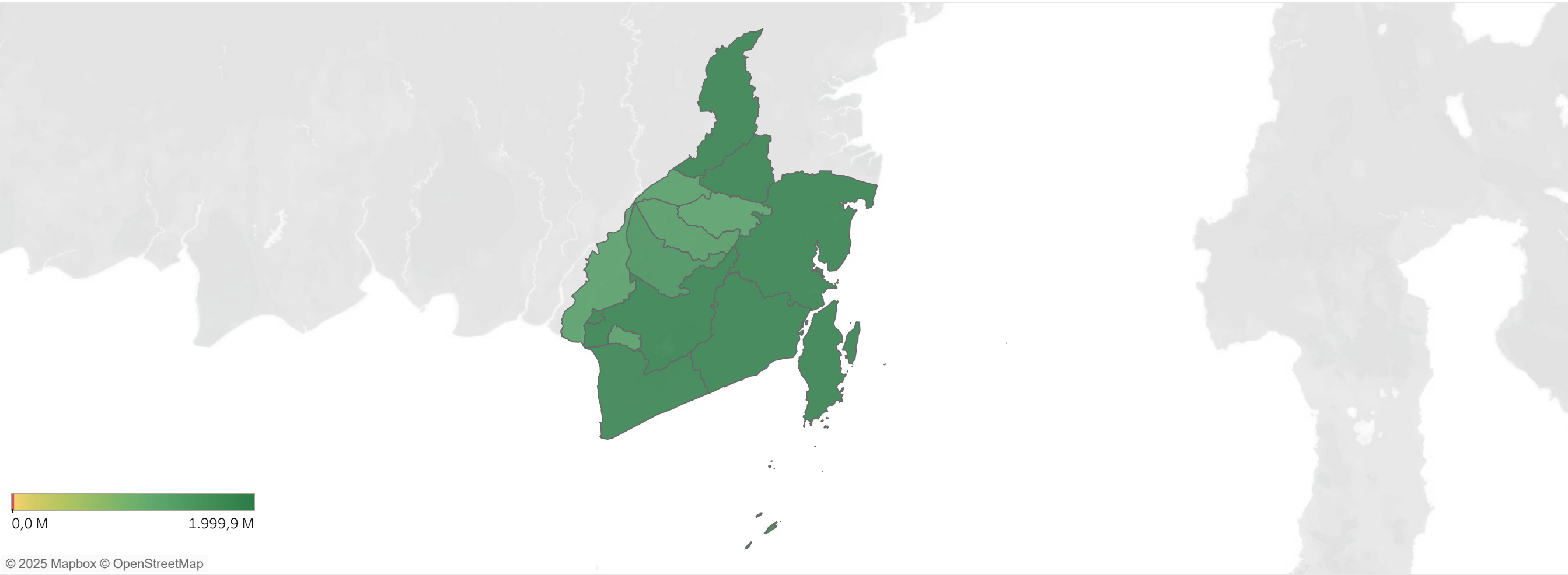
Belanja

Rp33,1 T (80,3%)
▼ -0,7% (yoy)

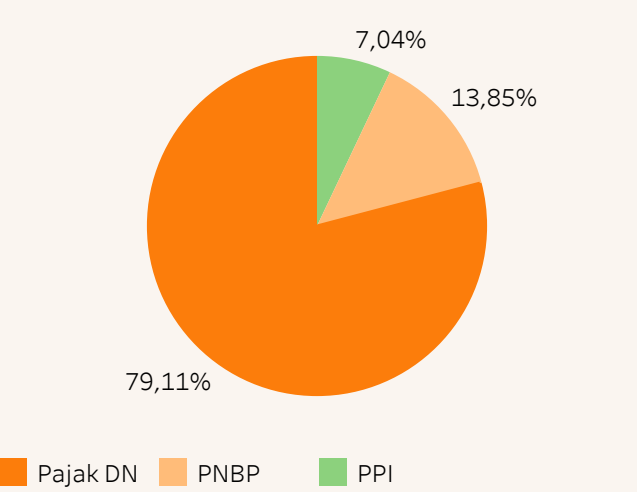
Defisit

Rp-21,9 T (55,3%)
▲ 30,3% (yoy)

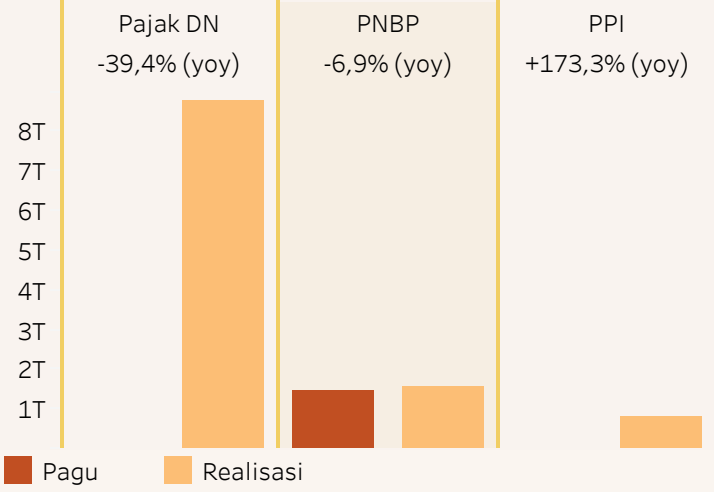
Peta Realisasi Belanja Negara per Wilayah



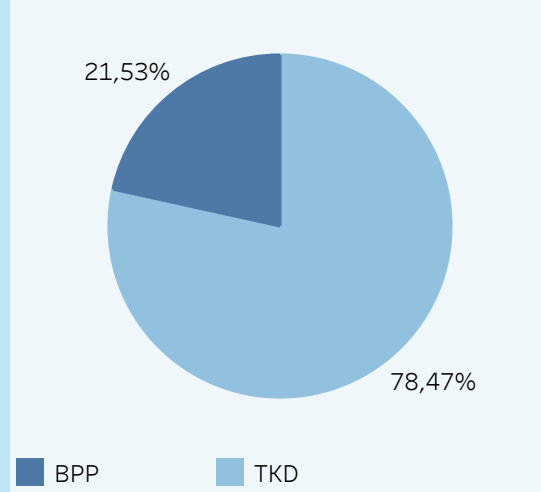
Persentase Komposisi Pendapatan



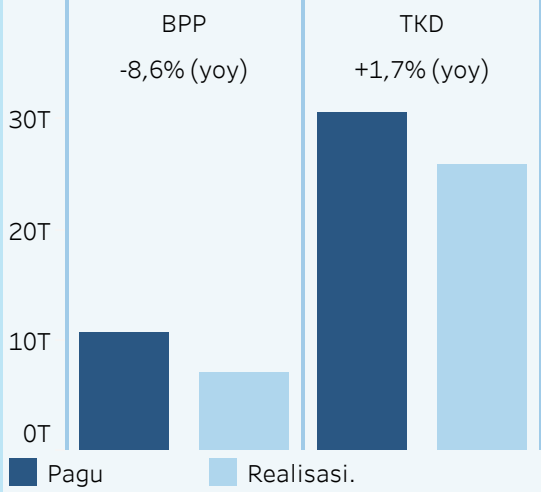
Realisasi per Jenis Pendapatan



Persentase Komposisi Belanja



Realisasi per Jenis Belanja



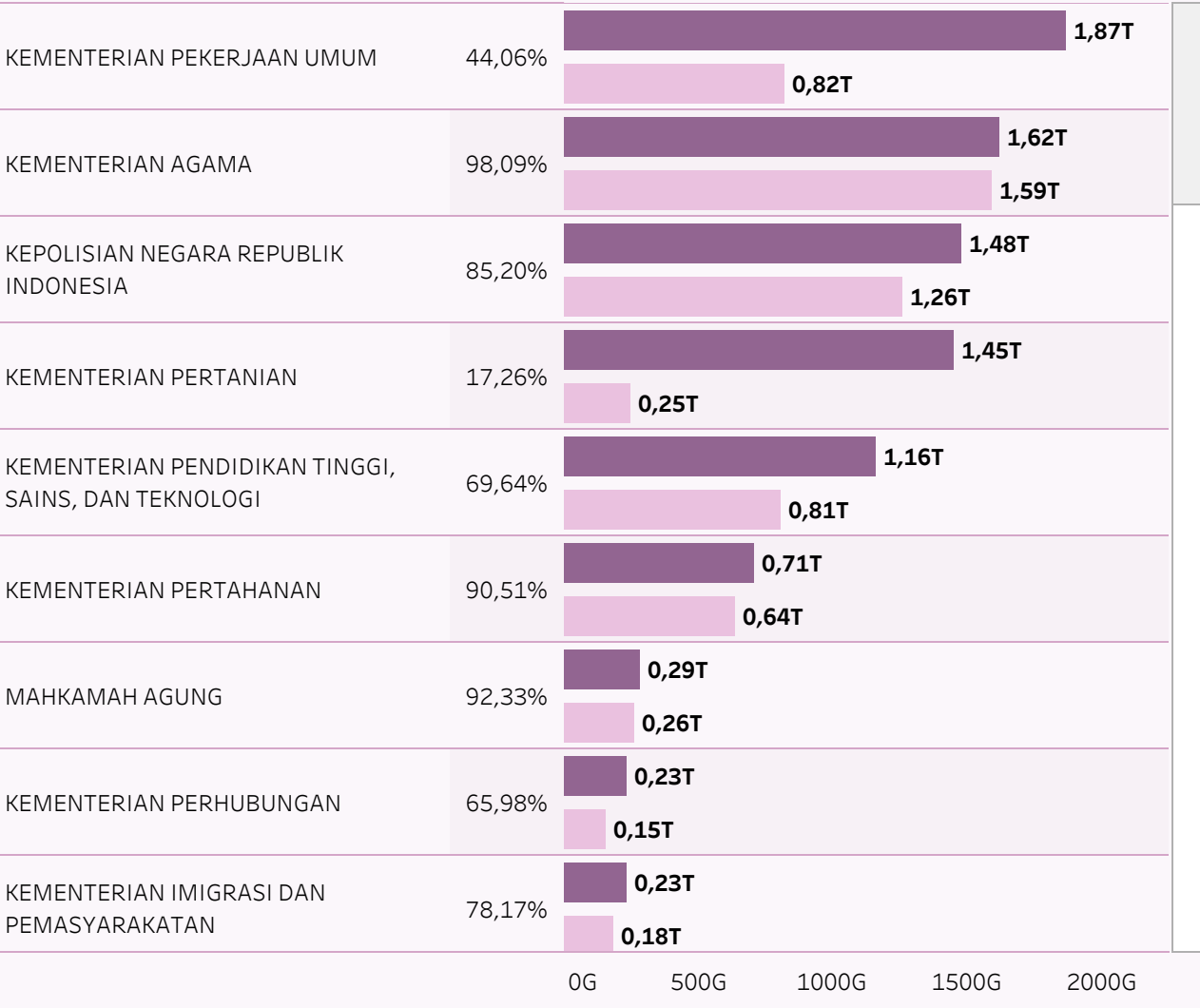
Pendapatan Regional

	Realisasi Y-1	Realisasi	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	16,4T	11,1 T	▼ 32,40%
Grand Total	16,4T	11,1 T	▼ 32,40%

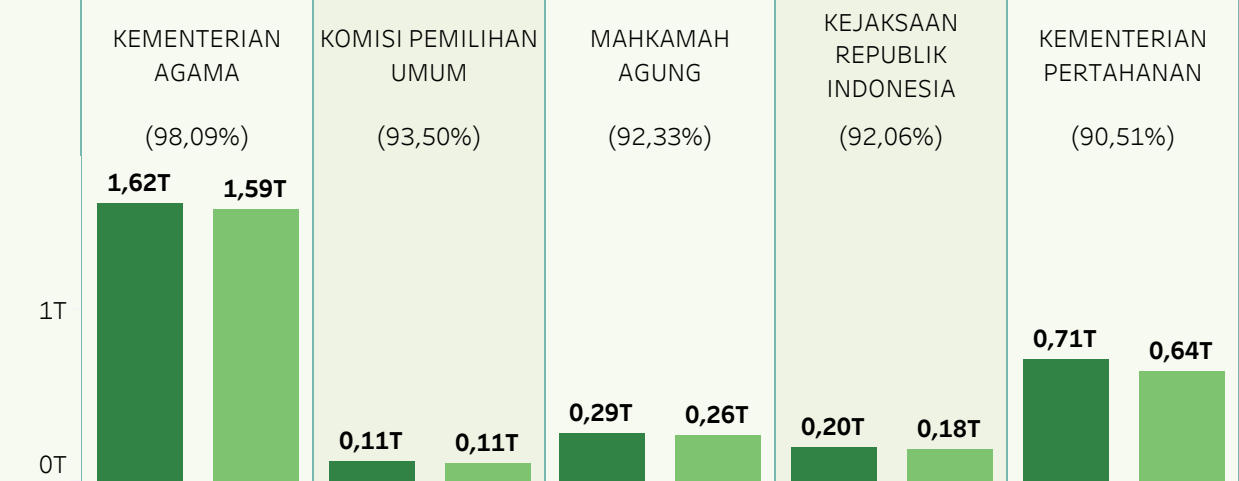
Belanja Regional

	Pagu Y-1	Realisasi Y-1	% thdp Pagu Y-1	Pagu	Realisasi	% thdp Pagu	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	41,7T	33,3T	79,9%	41,2T	33,1 T	80,3%	▼ 0,69%
Grand Total	41,7T	33,3T	79,9%	41,2T	33,1 T	80,3%	▼ 0,69%

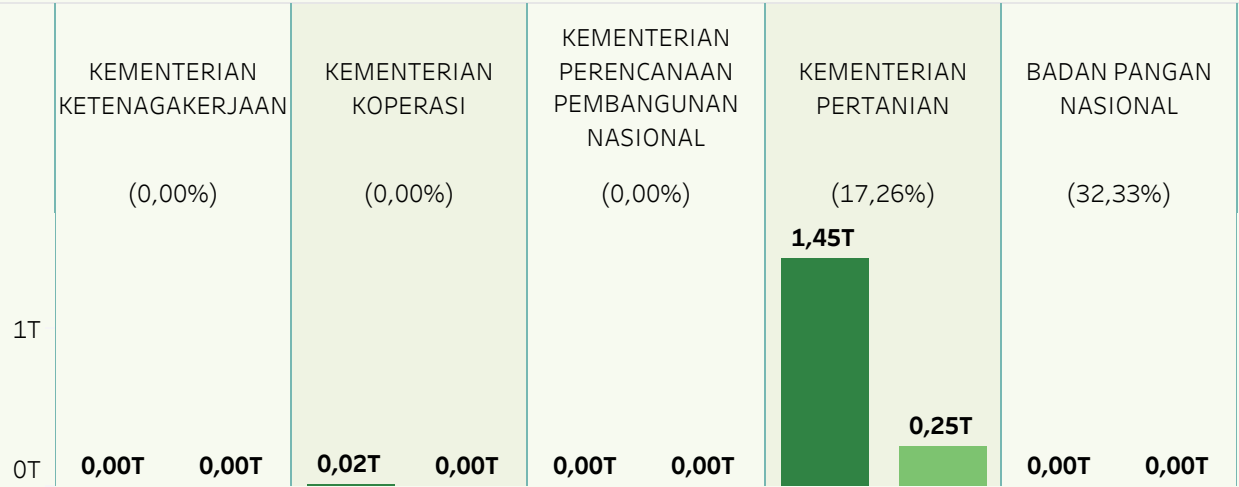
Kinerja 10 KL Pagu Tertinggi



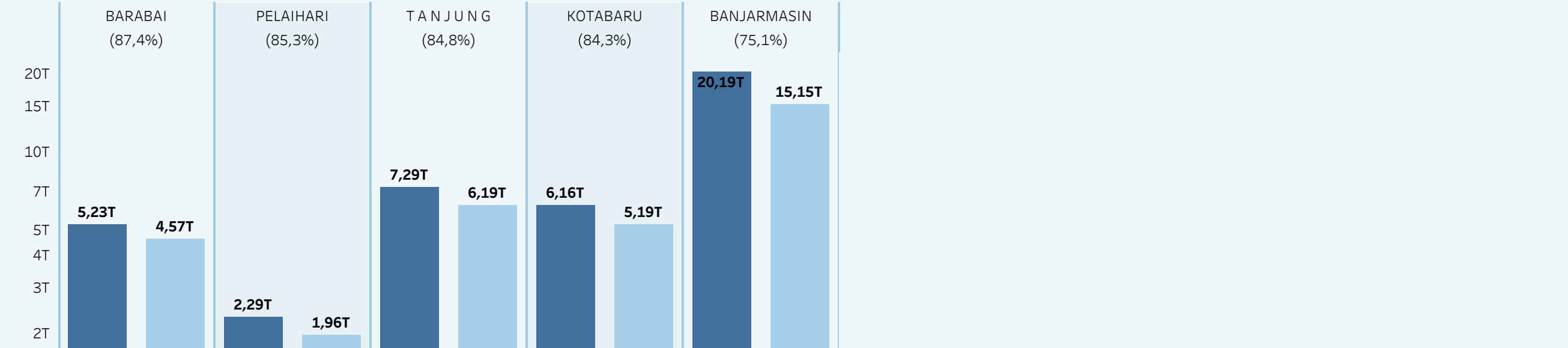
5 KL Persentase Realisasi Tertinggi



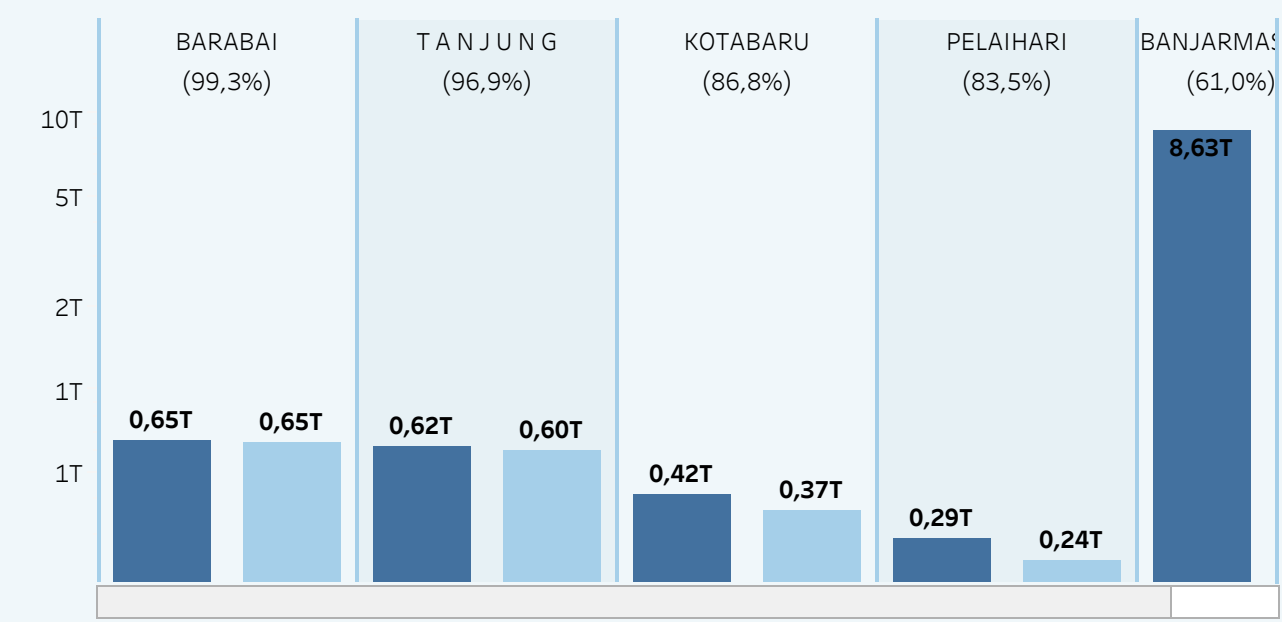
5 KL Persentase Realisasi Terendah



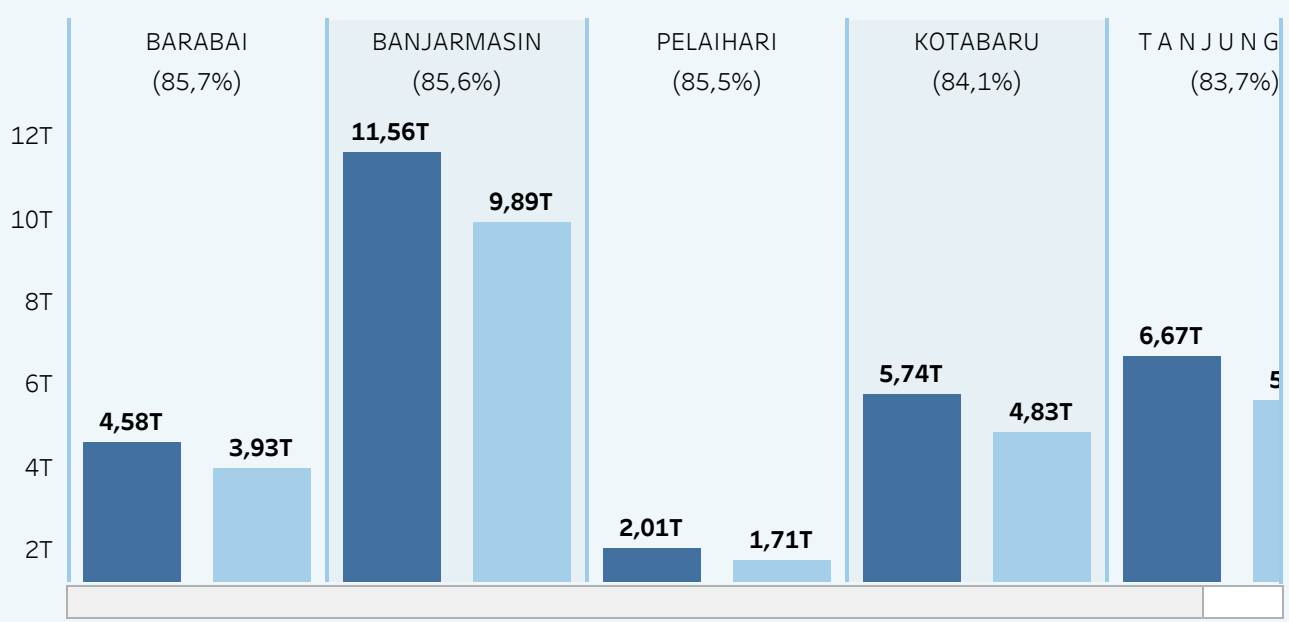
Kinerja Belanja KPPN



Kinerja BPP per KPPN



Kinerja TKD per KPPN



HASIL ANALISIS ISU FISKAL REGIONAL

Analisis Fiskal Regional

A | Perkembangan Pendapatan Negara s.d 14 November 2025

Kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp11,1 triliun (50,41%) dari target pendapatan negara sebesar Rp22,04 triliun, terkontraksi 32,40% yoy. Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai 43,14% (Rp 8,78 triliun), Pajak Perdagangan Internasional mencapai 301,28% (Rp782,63 miliar), serta PNPB mencapai 108,29% (Rp1,54 triliun). Pendapatan negara didominasi oleh Pajak Dalam Negeri (79,05%).

B | Perkembangan Belanja Negara s.d 14 November 2025

1. Kinerja Belanja Negara sebesar Rp33,1 triliun (80,31%) dari pagu Rp41,2 triliun, terkontraksi 0,7% yoy. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 67,06% (Rp7,12 triliun) dari pagu Rp10,62 triliun, terkontraksi 8,6% yoy dan Transfer ke Daerah mencapai 84,9% (Rp25,94 triliun) dari pagu Rp30,55 triliun, tumbuh 1,7% yoy. Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (78,47%).

2. Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi, Kementerian Pekerjaan Umum merupakan K/L dengan pagu tertinggi yaitu sebesar Rp1,87 triliun dengan realisasi mencapai 44,06% (Rp0,82 triliun). Kementerian Agama menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja tertinggi yaitu 98,09% (Rp1,59 triliun) dari pagu Rp1,62 triliun. Sementara, Kementerian Pertanian menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja terendah dengan realisasi baru 17,26% (Rp0,25 triliun) dari pagu Rp1,45 triliun.

3. Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi dan Terendah, kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh Kementerian Agama dengan realisasi 98,09% (Rp1,59 triliun) dari pagu Rp1,62 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah oleh Kementerian Pertanian dengan realisasi 17,26% (Rp0,25 triliun) dari pagu Rp1,45 triliun. Dan untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Ketenagakerjaan realisasinya masih 0%.

4. Kinerja KPPN, Kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh KPPN Barabai dengan realisasi sebesar 87,4% (Rp4,57 triliun) dari pagu Rp5,23 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah berada di KPPN Banjarmasin dengan realisasi 75,1% (Rp15,15 triliun) dari pagu Rp20,19 triliun.

Isu dan Rekomendasi Fiskal Regional

A | Isu Pendapatan Negara, meliputi:

Implementasi PMK Nomor 72 Tahun 2025, sebagai kebijakan stimulus pemerintah melalui perluasan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ditujukan bagi pegawai tertentu yang menerima penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria dan sektor usaha tertentu, seperti sektor pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan

B | Rekomendasi Pendapatan Negara, diperlukan:

Perlunya langkah-langkah strategis berupa peningkatan sosialisasi oleh Jajaran DJP lingkup Kalsel kepada pelaku usaha dan bendahara perusahaan agar memahami kriteria penerima dan mekanisme pemanfaatan insentif serta penguatan koordinasi antara Kanwil DJP Kalselteng, Dinas Pariwisata, dan asosiasi usaha untuk memastikan seluruh sektor pariwisata yang memenuhi syarat memperoleh akses informasi dan pendampingan.

C | Isu Belanja Negara, meliputi:

Banyak satker di daerah belum memperoleh informasi dari eselon I masing-masing terkait implementasi kebijakan pelaksanaan anggaran sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-666/MK.03/2025 Perihal Langkah Strategis Belanja Kementerian Negara/Lembaga Pada Akhir Tahun Anggaran Tahun 2025, sehingga terdapat satker tidak mengetahui perubahan batas waktu pangajuan Revisi DIPA Kewenangan Kanwil DJPb, dan Revisi DIPA Pemutakhiran Data Revisi Kewenangan KPA, serta tidak diperkenankannya revisi DIPA dalam rangka optimalisasi sisa anggaran kontraktual/swakelola sumber dana rupiah murni.

D | Rekomendasi Belanja Negara, diperlukan:

DJA dan Kantor Pusat DJPb segera berkoordinasi dengan eselon I K/L untuk memastikan bahwa Kebijakan Pelaksanaan Anggaran terkait Langkah Strategis Belanja Kementerian Negara/Lembaga Pada Akhir Tahun Anggaran Tahun 2025 sudah diinformasikan kepada satker di bawahnya dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

HASIL ANALISIS TEMATIK REGIONAL

Analisis Tematik Regional

A | FLPP, di Kalimantan Selatan terdapat peningkatan unit yang dibangun periode sebelumnya 9.690 menjadi 9.869 unit, peningkatan realisasi FLPP periode sebelumnya 9.043 unit menjadi 9.065 unit, peningkatan jumlah lokasi periode sebelumnya 649 lokasi menjadi 650, jumlah Kab/Kota yang ada program FLPP 13 Kab/Kota, dan nominal FLPP mengalami kenaikan periode sebelumnya sebesar Rp1.181.010.120.365,- menjadi Rp1.183.881.285.365,-

B | Giant Sea Wall, di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall.

C | Koperasi Desa Merah Putih, Progres realisasi anggaran KDMP masih belum terdapat realisasi dari alokasi pagu/perkiraan alokasi dana sebesar Rp6.039 M

Progres Fase I

Jumlah desa dan kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Merah Putih dan jumlah koperasi desa dan kelurahan yang sudah berbadan hukum adalah sudah maksimal seperti periode berikutnya yaitu sebanyak 2.013

Progres Fase II

a) Jumlah koperasi yang sudah memiliki akun simkopdes (*microsite*) sebanyak 2.013 terdapat penyesuaian data pada *website merahputih.kop.id*

b) Jumlah koperasi yang sudah memiliki gerai (minimal 1 gerai) mengalami kenaikan periode sebelumnya 346 menjadi 494.

c) Jumlah keseluruhan gerai koperasi yang sudah aktif semula 516 menjadi 568.

d) Jumlah koperasi melakukan permohonan proposal bisnis semula 100 menjadi 115.

e) Jumlah permohonan proposal bisnis semula 322 menjadi 364.

D | Sekolah Rakyat, Realisasi Jumlah Sekolah Rakyat yang sudah berjalan tetap seperti periode sebelumnya sebanyak 3 SR. Saat ini, target jumlah sekolah rakyat di Kalimantan Selatan sebanyak 3 SR.

E | Revitalisasi Sekolah, belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. pelaksanaan revitalisasi untuk jumlah target sekolah yang direvitalisasi adalah 64 sekolah yang terdiri dari 46 madrasah dan 18 sekolah di daerah transmigrasi.

Terdapat penambahan target revitalisasi sekolah pada madrasah sebanyak 3 sekolah.

Progres target 46 madrasah adalah 14 madrasah ditargetkan selesai tahun ini dan sisanya 32 madrasah baru tahap perencanaan dan ditargetkan selesai tahun depan melalui skema *multi years contract* (MYC).

F | SMA Unggul Garuda, belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Telah dilakukan peresmian SMA Garuda Transformasi pada SMAN Banua, oleh Menteri Ekonomi Kreatif pada tanggal 8 Oktober 2025. Peresmian SMA Garuda di Kalsel ini merupakan bagian dari peluncuran serentak di 16 Sekolah Se-Indonesia yang terdiri dari 4 sekolah baru dan 12 sekolah transformasi.

G| Ketahanan Pangan, terdapat kenaikan realisasi anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan semula Rp552,73M (29,74%) menjadi Rp590,35 M (31,76%) dari pagu sebesar Rp1,86 T.

H | Ketahanan Energi, belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah Kab. HST sedang mengusulkan untuk pembangunan Bendungan Pancur Hanau senilai Rp30 miliar. Bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi

Isu dan Rekomendasi Tematik Regional

A | Isu FLPP, meliputi:

Ketimpangan Realisasi FLPP antar kabupaten/kota menunjukkan distribusi program belum merata.

B | Rekomendasi FLPP, diperlukan:

Pengembangan FLPP antar kabupaten/kota agar tetap menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan.

C | Isu Giant Sea Wall, meliputi:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall

D | Rekomendasi Giant Sea Wall, diperlukan:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall

E | Isu Koperasi Desa Merah Putih, meliputi:

Beberapa KDMP sudah memiliki gerai namun belum beroperasi dikarenakan keterbatasan modal dan beberapa sudah beroperasi namun dengan lini usaha yang masih terbatas.

F| Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan:

Perlu dilakukan fasilitasi akses permodalan melalui skema pembiayaan yang sesuai kapasitas KDMP dan pendampingan bisnis harus diperkuat agar KDMP dapat memperluas lini usaha berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan pasar, termasuk penyusunan rencana bisnis, manajemen stok, dan strategi pemasaran.

G | Isu Sekolah Rakyat, meliputi:

Siswa sekolah rakyat menghadapi tantangan akibat perubahan kultural yang terjadi di lingkungan sosial sebelum dan sesudah menjadi bagian dari program sekolah rakyat. Hal ini siswa mengalami kesulitan beradaptasi dengan pola pembelajaran berbasis karakter yang diterapkan di sekolah rakyat.

H | Rekomendasi Sekolah Rakyat, diperlukan:

Memperkuat guru bimbingan dan konseling dan disarankan dengan latar belakang keahlian psikologi.

I | Isu Revitalisasi Sekolah, meliputi:

Lamanya proses kegiatan revitalisasi madrasah di Kalimantan Selatan, yang ditargetkan selama 270 hari kalender, berpotensi mengganggu proses kegiatan belajar dan mengajar.

J | Rekomendasi Revitalisasi Sekolah, diperlukan:

Perlu dilakukan penjadwalan pekerjaan yang lebih adaptif, termasuk pengaturan tahapan konstruksi agar tidak mengganggu ruang kelas yang sedang aktif digunakan. Madrasah dapat menyiapkan ruang kelas sementara (*temporary learning space*), memanfaatkan fasilitas pendidikan terdekat sebagai lokasi belajar transisi.

K | Isu SMA Unggul Garuda meliputi:

Diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar memanfaatkan kesempatan baik ini untuk melahirkan generasi muda unggul yang '*Go Internasional*' dan kembali ke daerah untuk membangun Kalimantan Selatan.

L | Rekomendasi SMA Unggul Garuda, diperlukan:

Perlu disiapkan program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan internasional bagi peserta didik berprestasi agar mampu mengembangkan wawasan global dan kompetensi internasional. Pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme pembinaan dan reintegrasi bagi lulusan Sekolah Garuda agar potensi dan pengetahuan yang mereka peroleh di luar daerah maupun luar negeri dapat dikonstruksikan kembali untuk kemajuan Kalimantan Selatan.

M | Isu Ketahanan Pangan meliputi:

Keterlambatan pelaksanaan Survei Investigasi Desain (SID) oleh pemda dan instansi terkait dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif sehingga menghambat akselerasi program cetak sawah.

N | Rekomendasi Ketahanan Pangan, diperlukan:

Memperkuat SDM dan mengintensifkan koordinasi antara tim penyusun SID dengan penyuluh pertanian setempat guna mengakselerasi SID sebagai dasar cetak sawah.

O | Isu Ketahanan Energi, meliputi:

Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Terdapat 2 pembangkit bio energi berjenis biomassa dengan jaringan *off grid* (tidak terhubung langsung dengan jaringan umum) di Kabupaten Tabalong dengan total kapasitas 2,6 MW, yaitu: Pembangkit pertama dikelola oleh PT. Cakung Permata Nusa I (ATA) di desa Kasiau dengan kapasitas 1,1 MW; dan Pembangkit kedua dikelola oleh PT. Astra Agro Lestari di desa Hayub dengan kapasitas 1,6 MW.

P | Rekomendasi Ketahanan Energi, diperlukan:

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi integrasi lokal, misalnya melalui penyediaan jaringan distribusi *mini-grid* atau skema *off-taker* lokal, agar listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan industri di sekitar lokasi.

HASIL ANALISIS MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Analisis MBG

Kinerja Program MBG (s.d. 14 November 2025) belum ada perubahan data pada aplikasi Sintesa dimana jumlah SPPG sebanyak 138, jumlah supplier 96, dan penerima manfaat 398.947 penerima.

Kanwil DJPb Provinsi Kalsel menjadi narasumber kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Tata Kelola Program MBG Provinsi Kalimantan, yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional RI pada tanggal 13 November 2025 di Banjarmasin

Isu dan Rekomendasi MBG

A | Isu MBG, meliputi:

Pelaksanaan operasional SPPG di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) terkendala perekrutan ahli gizi.

B | Rekomendasi MBG, diperlukan:

Pemanfaatan tenaga gizi dari Puskesmas atau kader gizi terlatih sebagai pendukung sementara dapat menjadi opsi agar pelaksanaan SPPG tetap berjalan sambil menunggu pemenuhan tenaga ahli secara penuh.